

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dinamika gerakan sosial keagamaan di Indonesia sangat menarik untuk dikaji. Dikatakan menarik, karena salah satu agendanya adalah menyebarkan gagasannya dan ingin meraih kekuasaan yang ada. Pertama penulis terlebih dahulu akan mencoba menelaah tentang agama dan sejarah perkembangannya serta gerakan keagamaan (Islam) di Indonesia kemudian masuk ke inti permasalahan.

Agama merupakan suatu sistem sosial yang dipraktekkan masyarakat untuk mengabdikan (menyembah) Ilahi semata. Sistem sosial tersebut dipercayai merupakan sebuah aturan yang berisi perintah, hukum, kata-kata yang langsung datang dari Ilahi agar manusia mentaatinya. Perintah dan kata-kata tersebut mempunyai kekuatan Ilahi sehingga dapat difungsikan untuk mencapai atau memperoleh keselamatan secara pribadi dan masyarakat.

Sebagai apa yang dipercayai, agama memiliki peranan penting dalam hidup dan kehidupan manusia baik secara pribadi maupun secara kelompok. Agama secara umum memiliki fungsi sebagai jalan penuntun penganutnya untuk mencapai ketenangan hidup dan kebahagiaan di dunia maupun di kehidupan

kelak. Masyarakat maju yang beragama umumnya cenderung pada paham monoteisme, yakni meyakini hanya adanya satu Tuhan, yang menciptakan segenap alam semesta seperti rumusan syahadat. Secara teologis, para tokoh agama (ulama) membagi agama-agama yang ada di dunia menjadi dua kelompok, yakni: agama wahyu dan agama bukan wahyu.

Agama Islam adalah agama wahyu yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad bertujuan untuk mengesakan Allah semata. Agama Islam yang dibawa oleh Nabi bukan hanya diperuntukkan kepada kaumnya saja melainkan untuk seluruh alam semesta (*Rahmatan lil a'lam*). Risalah Islam dibawa oleh Nabi Muhammad SAW di Jazirah Arab pada abad ke-7 Masehi ketika Nabi Muhammad SAW mendapat wahyu dari Allah SWT sampai wafatnya Nabi di Madinah. Rasulullah SAW wafat pada bulan Juni tahun 632 M. Pasca Nabi Muhammad SAW, *kekhilafahan*/kerajaan Islam berkembang hingga Samudra Atlantik di Barat dan Asia Tengah di Timur. Hingga umat Islam berpecah dan terdapat banyak kerajaan-kerajaan Islam lain yang muncul.

Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW pada tahun 632 M, kepemimpinan Islam dipegang oleh para khalifah (pemimpin). Dibawah kepemimpinan para khalifah, agama Islam mulai disebarkan lebih luas lagi. Sampai abad ke-7, pengaruh Islam telah menyebar ke seluruh Timur Tengah, Afrika Utara, dan Spanyol. Kemudian pada masa Dinasti Umayyah, pengaruh Islam mulai berkembang hingga Nusantara (Indonesia).

Awal masuknya Islam ke Indonesia bertepatan pada tahun pertama Hijriyah atau sekitar abad ke-7 M, Islam masuk ke Kepulauan Nusantara Indonesia melalui jalur perdagangan yang dibawa oleh kaum pedagang dan para penyiara agama yang berasal dari Jazirah Arab, Gujarat, serta Persia. Sejarah mencatat bahwa kaum pedagang memegang peranan penting dalam persebaran agama dan kebudayaan Islam. Letak Indonesia yang strategis menyebabkan timbulnya bandar-bandar perdagangan yang turut membantu mempercepat persebaran tersebut. Di samping itu, cara lain yang turut berperan yaitu melalui dakwah yang dilakukan para *mubaligh*. Dalam proses itu, Islam mengalami *dialektika* budaya dengan suku bangsa di Nusantara sebelum diterima sepenuhnya. Barulah setelah diterima, pada kelompok budaya tertentu, Islam menjadi salah satu bagian dari identitas budaya.

Ajaran Islam ini sangat menarik perhatian penduduk Indonesia. Dengan demikian, dakwah dan pengaruh Islam makin meluas, baik di kalangan masyarakat biasa, maupun bangsawan atau penguasa. Hadirnya Islam merupakan bukti autentik sebuah revolusi yang selama berabad-abad telah berperan sangat signifikan dalam panggung sejarah umat manusia. Tidak diragukan lagi, Islam telah menjadi penanda perubahan, bukan hanya dalam bidang teologi, tetapi juga di bidang sosial dan ekonomi.

Seiring perkembangan zaman, kemajuan umat Islam di Indonesia tidak lepas dari peran tokoh dan berbagai organisasi keislaman yang secara aktif melakukan kegiatan amal usaha yang meliputi bidang agama, pendidikan, kemasyarakatan, dan lain sebagainya. Munculnya tokoh dan berbagai organisasi Islam merupakan

pendorong bagi proses transformasi sosial dan budaya yang signifikan dalam sejarah Bangsa Indonesia.

Perkembangan Islam di Indonesia, khususnya sejak 1980-an, telah memasuki babak baru. Hal ini ditandai dengan muncul dan menguatnya nilai keagamaan umat Islam. Berbagai fenomenapun terus berkembang dalam masyarakat dan fenomena ini ditengarai sebagai Kebangkitan Islam (*Revivalisme* Islam). Menurut Chouieri (1990:21), munculnya *Revivalisme* Islam dilatarbelakangi oleh kemerosotan moral, sosial dan politik umat Islam. Menurutnya, *Revivalisme* Islam hendak menjawab kemerosotan Islam dengan kembali kepada ajaran Islam yang murni. Inipun terlihat menguatnya warna keagamaan dalam berbagai aktivitas sosial secara luas mencakup aspek-aspek kehidupan pribadi dan masyarakat misalnya meningkatnya kegiatan peribadatan, ramainya pengajian, pendirian lembaga pendidikan dan ekonomi Islam, pengembangan berbagai program dan publikasi-publikasi keagamaan.

Selain fenomena di atas, kebangkitan Islam ini juga ditandai munculnya berbagai gerakan Islam baru. Aktor baru ini terdiri dari gerakan Tarbiyah yang kemudian menjadi PKS, Hizbut Tahrir yang kemudian masuk ke Indonesia menjadi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Majelis Mujahidin Indonesia, Front Pembela Islam, Laskar Jihad, dan sebagainya, merupakan representasi generasi baru gerakan Islam di Indonesia.

Gerakan-gerakan ini berusaha membangkitkan kembali kejayaan Islam. Telah banyak upaya-upaya yang dilakukan dengan berusaha berjuang masuk ke dalam sistem ketatanegaraan formal maupun bergerak di luar sistem politik yang ada. Hal tersebut sebagai salah satu langkah mendapatkan pengaruh atau meraih kekuasaan untuk mewujudkan ambisi menerapkan syariat Islam dalam bingkai kenegaraan.

Di era reformasi ini, yang ditandai dengan euforia politik dan terbukanya gerak kebebasan berekspresi dimanfaatkan dengan sungguh-sungguh oleh berbagai gerakan Islam baru ini yang menuntut diberlakukannya syariat Islam. Meskipun perjuangan sebagian partai politik Islam yang ada di legislatif untuk menegakkan syariat Islam tidak terdengar lagi, namun berbagai gerakan sosial keagamaan yang ada di luar sistem pemerintahan masih tetap eksis menuntut ditegakkannya syariat Islam di Tanah Air.

Aktor gerakan baru yang muncul pada masa ini berbeda dengan aktor gerakan Islam yang lama, seperti NU, Muhammadiyah, Persis, dan sebagainya. Gerakan mereka berada di luar kerangka *mainstream* proses politik, maupun wacana dalam gerakan Islam dominan. Mereka memiliki basis ideologi, pemikiran dan strategi gerakan yang berbeda dengan ormas-ormas Islam yang sebelumnya. Mereka ditengarai berhaluan puritan, memiliki karakter yang lebih militan, radikal, konservatif, skripturalis, dan eksklusif. Meskipun mereka memiliki *platform* yang beragam, tetapi pada umumnya memiliki kesamaan visi, yakni pembentukan

“negara Islam” dan mewujudkan penerapan syariat Islam, baik dalam wilayah masyarakat, maupun negara.

Gerakan Islamisasi versi mereka lebih bercorak konfrontatif terhadap sistem sosial dan politik yang diterapkan sekarang. Gerakan ini menghendaki adanya perubahan mendasar terhadap sistem yang ada saat ini dan kemudian berupaya menggantinya dengan sistem baru yang mereka anggap sebagai Islam. Islam sebagai alternatif sekaligus merupakan solusi, bagi mereka syariat Islam adalah solusi krisis. Hizbut Tahrir adalah yang paling solid dan gerakan yang bersifat transnasional memiliki jaringan paling luas di antara gerakan-gerakan baru yang intens berjuang menegakkan syariat Islam tersebut. Bahkan Hizbut Tahrir juga yang paling radikal karena Hizbut Tahrir tidak hanya berambisi menegakkan syariat Islam melainkan mewujudkan kembali kepemimpinan *khilafah*. Menurut Hizbut Tahrir penegakkan syariat Islam secara kaffah mustahil akan terwujud bila tidak ada institusi yang menjalankannya yaitu dalam bingkai *khilafah*.

Dalam Hizbut Tahrir (2009:3), *Mengenal Hizbut Tahrir dan Strategi Dakwah Hizbut Tahrir* mengungkapkan bahwa Hizbut Tahrir adalah partai politik yang berideologi Islam. Politik merupakan aktivitasnya. Hizbut Tahrir merupakan kelompok politik, bukan yang bersandar pada kerohanian semata, bukan lembaga pendidikan dan bukan pula lembaga sosial.

Melihat klaim dari Hizbut Tahrir yang menyatakan dirinya sebagai partai politik dimana partai politik pada umumnya berorientasi akhir pada kewenangan membuat kebijakan. Maka secara teori partai politik dapatlah dikatakan bahwa pergerakan ini mengarah pada memperoleh kekuasaan. Kekuasaan itu sendiri pada akhirnya bermuara pada kewenangan dalam membuat kebijakan. Kewenangan membuat kebijakan tentu akan digunakan Hizbut Tahrir dalam merubah kondisi masyarakat sesuai dengan pemikiran Islam.

Agenda politik yang dijalankan Hizbut Tahrir menempatkan diri sebagai kekuatan oposisi yang menentang penguasa yang tidak menerapkan aturan Islami dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, sistem politik Islami, syariah dan hukum-hukum Islam. Karena menurut Hizbut Tahrir, penguasa yang meniadakan semua itu berarti mengkhianati amanat rakyat dan melakukan penindasan khususnya bagi umat Islam serta kewenangannya bertentangan dengan ajaran Islam.

Dari keseluruhan aktivitas mereka, yang paling menonjol adalah kegiatan kampanye untuk menolak sistem politik yang berasal dari barat. Menolak konsep demokrasi, nasionalisme, *trias politika*, kedaulatan rakyat, sistem kekuasaan turun-temurun, hukum sekuler dan konsep politik yang dianggap tidak sesuai dengan syariat Islam. (Rahmat, 2005:52)

Aktivitas penyebaran pemikiran Islami ala Hizbut Tahrir ini pada ujungnya diharapkan berkembang menjadi kesadaran baru yang tumbuh di kalangan

masyarakat. Ketika kesadaran ini telah menyebar dan menjadi keyakinan masyarakat maka menurut mereka akan dengan sendirinya muncul perlawanan masyarakat dalam bentuk *people power* dan para aktifis Hizbut Tahrir akan merebut kekuasaan. Ketika kekuasaan telah direbut, maka aktivis Hizbut Tahrir akan mudah melakukan Islamisasi sistem kenegaraan dalam bentuk *khilafah Islamiyah* dengan berdasarkan syariat Islam (Rahmat, 2007:54).

Terkait sumbangsih terhadap kebijakan pemerintah perjuangan politik yang dilakukan Hizbut Tahrir Indonesia adalah menyampaikan dan memberikan solusi fundamental dan integral bahwa hanya dengan syariat Islam dalam bingkai negara sebagai solusi krisis mengatasi kondisi masyarakat dan negara dari berbagai macam permasalahan. Selain itu apa saja yang dilakukan pemerintah mengenai berbagai kebijakan seperti membuat aturan atau undang-undang yang berpotensi merugikan rakyat atau menyimpang dari Islam maka mereka dengan cepat tanggap segera memberikan tekanan politik, mengkritik, menentang, dan mengingatkan dalam hal amar *ma'ruf nahi mungkar* terhadap pemerintah untuk segera menghentikan kebijakannya yang nyata-nyata mengkhianati rakyat khususnya umat Islam dan sekaligus menawarkan solusi alternatif untuk pemerintah.

Dari program yang mereka jalani terhadap pemerintah berupa kunjungan yang dimaksudkan sebagai *silah ukhuwah* Hizbut Tahrir Indonesia dengan instansi-instansi pemerintahan serta untuk menyampaikan buah pemikiran Hizbut Tahrir



Indonesia sebagai kontribusi penyelesaian terhadap masalah di Indonesia yang sekarang ini mengalami kemerosotan oleh sistem kapitalisme yang diterapkan.

Perlu dicermati bahwa menurut Hizbut Tahrir Indonesia, perubahan yang dilakukannya bukan hanya sekedar mengkritisi kebijakan saja akan tetapi perubahan secara menyeluruh yaitu melakukan perubahan sistem. Selain itu, tujuan Hizbut Tahrir Indonesia adalah mewujudkan kembali negara *khilafah*, bukan masuk ke dalam sistem pemerintahan mengikuti politik-politik resmi yang bertujuan meraih kekuasaan dari struktur pemerintahan baik level bawah maupun level atas. Meski demikian sampai saat ini Hizbut Tahrir Indonesia belum berhasil merealisasikan proyek mereka yaitu mendirikan kembali *khilafah*.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah bagaimana upaya pencapaian Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dalam perubahan kebijakan menuju kepemimpinan *khilafah*?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan upaya pencapaian Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dalam perubahan kebijakan menuju kepemimpinan *khilafah*.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian merupakan manfaat yang dapat dipetik dari pemecahan masalah yang didapat dari penelitian. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan, antara lain:

1. Kegunaan akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memberikan sumbangan untuk perkembangan ilmu pengetahuan khususnya terhadap kajian ilmu Sosiologi terutama mengenai Sosiologi Agama, dan Sosiologi Politik.

2. Kegunaan praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan bagi para pembaca yang memerlukan informasi mengenai HTI. Dan sebagai bahan masukan bagi HTI dalam mengelola organisasinya dan organisasi keagamaan yang lain.